



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PENGUMUMAN

13/PP.00/05/2019

### Tentang

#### **HASIL PENILAIAN TAHAP II PROPOSAL PENELITIAN KOMPETITIF KERJASAMA MK DENGAN FH PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA TAHUN 2019**

Tim Penilai Proposal Penelitian Kompetitif kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa Hasil Penilaian Proposal Penelitian Kompetitif Kerjasama MK dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2019 Tahap II, sebagaimana pada *Lampiran*.

Terhadap 10 (sepuluh) Proposal Penelitian sebagaimana pada lampiran dimaksud dimohon untuk segera mengirimkan *Curriculum Vitae*, SIUP/SK Pendirian Lembaga, NPWP, Nomor Rekening Universitas, melalui email : [puslitka@mkri.id](mailto:puslitka@mkri.id) cc: [puslitka\\_mk@yahoo.com](mailto:puslitka_mk@yahoo.com) paling lambat tanggal 17 Mei 2019, guna penyusunan Perjanjian Kerjasama antara MK dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang diwakili oleh Dekan FH masing-masing.

**Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan Keputusan Tim Reviewer Proposal Penelitian Kompetitif bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.**

Jakarta, 08 Mei 2019  
a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kapuslitka,  
**Rubiyo, Ak., M.Si.**



Digital Signature-mk2666974170

## Lampiran

Tentang : Hasil Penilaian tahap II Proposal Penelitian Kompetitif TA 2019

Tanggal : 08 Mei 2019

NO	JUDUL PENELITIAN	TIM PENELITI
1	Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review Undang-Undang Pidana yang Mengakibatkan Perubahan Norma dalam Hukum Pidana Materiil Ditinjau dari Asas Legalitas	Dr. Widati Wulandari, S.H., M.CRIM., dkk. <b>(Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)</b>
2	Formulasi Dissenting Opinion Sebagai Expert Opinion Sumber Hukum Tata Negara Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.Hum., dkk. <b>(Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK))</b>
3	Peran Progresif Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015)	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., dkk. <b>(Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember)</b>
4	Pengakuan Atas Konstitusionalitas kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (Studi Pada Kesatuan MHA Matteko, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan)	Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, S.H., M.H., dkk. <b>(Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar)</b>
5	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Alam	Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum., dkk. <b>(Fakultas Hukum Universitas Andalas)</b>
6	Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., dkk. <b>(Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)</b>
7	Implementasi Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 Terhadap rahasia Bank Atas Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Pada Perbankan di Malang Raya)	Risma Nur Arifah, S.H.I., M.H., dkk. <b>(Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang)</b>
8	Dinamika Perkembangan Hukum Islam Dalam Konstruksi Hubungan Negara Dan Agama Di Indonesia Melalui Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi	Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M., dkk. <b>(Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)</b>
9	Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin	Dr. Agus Purnomo, M.H, dkk. <b>(Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo)</b>
10	<i>Constitutional Compliance</i> Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara	Dr. Tri Sulistyowati, S.H. M.H, dkk. <b>(Fakultas Hukum Universitas Trisakti)</b>